

PPKM DARURAT

Pukulan Berat Ekonomi Rakyat

PEMBERLAKUAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat merupakan pukulan berat ekonomi rakyat. Terutama pelaku ekonomi kecil dan pekerja informal harian yang mengandalkan rejeki dari pergerakan orang. Sebab pergerakan dan mobilitas warga dibatasi. Pusat perbelanjaan tutup, kecuali outlet yang menjual bahan pokok atau obat-obatan. Pemerintah pun membatasi operasional tempat makan, restoran maupun pedagang kaki lima.

Kebijakan pembatasan yang dilakukan pemerintah kali ini membuat pedagang bangkrut kehilangan pendapatan, menjual aset untuk membayar utang, usaha banyak yang mati suri, dan terpaksa merumahkan tenaga kerja.

Pemerintah wajib hadir memberikan bantuan, terutama memenuhi kebutuhan warga terdampak, agar mampu bertahan hidup serta memberikan stimulus permodalan bagi pelaku usaha kecil untuk bangkit.

Ketua DPW Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Mohlas Madani mengatakan, PKL terpaksa tidak berjualan akibat dampak implementasi PPKM Darurat diperpanjang sampai 25 Juli 2021. Alhasil, jika PKL tidak berjualan, otomatis banyak harta benda yang harus dijual untuk bertahan hidup, karena tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Selain biaya kebutuhan hidup, PKL juga membutuhkan biaya pendidikan, harus membayar angsuran kredit dan sebagainya, sehingga dampaknya sangat luar biasa.

"Hidup para PKL di DIY sangat susah, tidak mendapat pemasukan karena mematuhi kebijakan PPKM Darurat. Belum lagi ditambah beban hidup sehari-hari maupun kebutuhan lainnya yang harus ditanggung sehingga kondisinya sudah sangat kritis dan memprihatinkan saat ini," katanya.

Mohlas menyampaikan dari sekitar 20.000 PKL di DIY, setidaknya 60 persen sudah memilih tidak berjualan, termasuk pemasaran online. Sedangkan sisanya memilih berjualan karena demi bertahan hidup dan sudah tidak mungkin berhutang. Bahkan, omzet PKL di DIY tidak lagi turun

hingga 80 persen, tapi sudah terjun bebas alias tidak ada pemasukan. Banyak PKL berhenti berjualan karena tidak punya modal dan banyak yang terbelit utang.

"Jika nominal kerugiannya secara pasti, saya sulit memprediksi karena tidak menghitungnya secara rigid. Yang jelas dan pasti kerugiannya sangat besar. Teman-teman PKL di DIY membutuhkan bantuan, baik bantuan tunai maupun sembako demi bertahan hidup hingga stimulus skema-skema permodalan agar bisa bangkit kembali saat ini," ujarnya.

APKLI DIY sudah berupaya bergotong royong sekutut tenaga membantu anggotanya yang sangat terdampak PPKM Darurat ini, khususnya bagi PKL yang terkonfirmasi Covid-19. Untuk itu, pihaknya sangat berharap keberpihakan pemerintah memberikan lampu hijau terhadap skema-skema permodalan untuk membantu pelaku UMKM, salah satunya PKL.

Setidaknya 3.000-an PKL di kawasan Malioboro mendapatkan pukulan berat dan luar biasa akibat pandemi yang diperparah adanya PPKM Darurat karena tidak bisa berdagang. Jika tidak berdagang, maka otomatis tidak memperoleh pendapatan bahkan mereka rugi hingga miliaran rupiah.

"Jadi mereka sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk bertahan hidup, dan stimulus permodalan agar mampu membangkitkan kembali usahanya yang sudah tidak beroperasi sejak awal diberlakukannya PPKM Darurat di DIY," papar Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro Sujarwo Putra.

Sujarwo mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat dengan memberi kelonggaran bagi PKL untuk kembali berjualan secara bertahap jika situasi sudah memungkinkan. Begitu pula komitmen pemerintah pusat untuk sedikit meringankan beban PKL dengan Bantuan Tunai Langsung (BLT). Pihaknya meyakini Pemda DIY dan Pemerintah Kota Yogya akan merespons dengan cepat dan tepat kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesegera mungkin dan sesuai kondisi lokalitas Yogya, termasuk Malioboro.

Salah satu kondisi yang penting dipertimbangkan adalah memberi toleransi



KR-Fira Nurfiani

Suasana semi pedestrian yang lenggang di kawasan Malioboro selama PPKM Darurat.

lebih panjang kepada PKL lesehan Malioboro agar tutup lebih lama sampai pukul 23.00. Hal ini mengingat mereka baru bisa efektif mulai berdagang paling cepat pukul 18.30. "Kami juga berharap, bantuan dapat segera direalisasikan dengan tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan keresahan," katanya.

Pihaknya juga meminta Pemda DIY melalui Danais maupun APBD dan kepada Pemkot Yogya melalui APBD agar memberikan stimulan dana hibah untuk modal bergulir kepada PKL di kawasan Malioboro. Penyalurannya harus melalui koperasi dan paguyuban yang memayungi PKL agar tepat sasaran dan menutupi lubang yang belum tercover pusat, sehingga semua yang berhak menerima bisa terakomodir agar suasana kondusif.

PKL di kawasan Malioboro diharapkan bersabar, bersikap tenang dan bahu membahu dengan aparat untuk menjaga dan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 secara optimal jika kembali diijinkan beraktivitas. "Kami tidak bisa mengais rejeki alias total menganggur, pemasukan nihil dan lumpuh total sejak PPKM Darurat. Bahkan banyak PKL yang pinjam uang karena modalnya sampai tergerus habis untuk menyambung hidup sehari-hari. Ini sangat memprihatinkan, harapannya pemerintah bisa mengambil langkah agar PKL yang terpuruk bangkit kembali," imbuh Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) Desio Hartonowati.

Pedagang di pasar tradisional turut terpuluk dan terdampak PPKM Darurat. Hal ini sangat dirasakan Tinem, pedagang kios sembako di Pasar Beringharjo. Tinem mengatakan, pedagang sembako terkena imbas PPKM Darurat karena jumlah pengunjung maupun jam buka dibatasi. Hal itu mempengaruhi omzet yang turun hingga 50 persen. Bahkan, banyak

pedagang pasar yang memutuskan tidak berjualan, bukan karena permasalahan atau keterlambatan distribusi produk bahan pokok. Tapi karena pembeli sepi dan pendapatannya berkurang di masa PPKM Darurat.

Terpisah Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI DIY Miyono mengatakan, secara umum PPKM Darurat berdampak terhadap sektor perekonomian terutama menekan produktivitas. Secara spesifik, PPKM Darurat ini hanya berdampak pada sektor tertentu. Sektor paling terkenan dari PPKM Darurat adalah transportasi dan sektor akomodasi, makan dan minum.

"Sektor perdagangan dan industri pengolahan diperkirakan mengalami tekanan dari pembatasan ini, tetapi dampaknya dapat diminimalkan melalui digitalisasi. Adapun sektor konstruksi, pertanian maupun informasi dan komunikasi (infokom) yang menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan I 2021, relatif tidak terlalu terpengaruh," paparnya.

Miyono menyatakan, BI mencatatkan masih terjadi *net outflow* sebesar Rp 834 miliar di DIY sepanjang Juli 2021. Artinya, uang kartal yang keluar dari BI lebih besar dibandingkan uang yang masuk ke kas BI alias masih terjadi kegiatan konsumsi. Jika terjadi *net outflow* diindikasikan transaksi masyarakat atau peredaran uang masih banyak, sehingga kebutuhan uang kartalnya juga masih banyak.

Pihaknya juga telah melakukan simulasi potensi dampak dari PPKM Darurat yang ditetapkan pemerintah terhadap kondisi ekonomi DIY.

Skenario pertama adalah asumsi dari PPKM Darurat yang diberlakukan sejak 3 sampai dengan 20 Juli 2021 terhadap proyeksi ekonomi DIY dan skenario kedua apabila PPKM Darurat diperpanjang hingga Agustus 2021.

Hasil simulasi skenario pertama menunjukkan PPKM Darurat memiliki dampak yang terbatas pada perekonomian DIY. Ekonomi DIY pada 2021 berpotensi tumbuh pada kisaran 4,5 sampai 5,3 persen dengan titik tengah berada pada kisaran 4,9 persen. Namun apabila PPKM Darurat diperpanjang hingga Agustus 2021, maka ekonomi DIY berpotensi turun pada range di bawah proyeksi.

"Kami meyakini ekonomi DIY masih akan melanjutkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,4 hingga 5,4 persen (yoy) pada 20212 mendatang," tegasnya. Lebih lanjut Miyono menyampaikan, pihaknya memberikan beberapa rekomendasi guna menahan dampak negatif Covid-19 bagi perekonomian DIY, antara lain perlunya kedisiplinan dalam menjalankan pembatasan aktivitas agar dapat segera memutus mata rantai Covid-19, mengimbau dan menguatkan semangat gotong royong yang merupakan budaya leluhur masyarakat DIY.

Dalam kondisi gelombang kedua ini, ketahanan sektor kesehatan sebagai garda terdepan melawan pandemi harus terus dijaga. Rekomendasi berikutnya, mendorong masyarakat utamanya kelas menengah ke atas agar terus berkonsumsi dan meningkatkan sinergi komunikasi bersama, terutama komunikasi kebijakan pemerintah.

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah pusat merealisasi penggunaan Dana Keistimewaan (Danais), agar dapat digunakan membantu penanganan Covid-19 di DIY. Selain itu, perlu ada kolaborasi bersama dengan swasta dalam memfokuskan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam menjaga ketahanan sektor kesehatan dan menopang masyarakat berpendapatan rendah yang terdampak Covid-19," katanya pula. **(Ira)**

Grafis: Ario

KANDHA RAHARJA

PELUANG USAHA DI TENGAH PANDEMI

Bakso Ikan Gabus Tingkatkan Imun Tubuh

IKAN gabus dikenal memiliki khasiat tinggi. Bahkan kandungan nutrisi dalam daging ikan berkepala mirip ular itu diyakini mampu menjadi obat mempercepat penyembuhan luka.

Namun, nama ikan gabus masih sebagai komoditas konsumsi, masih kalah tenar dengan jenis ikan air tawar lainnya seperti lele dan nila. Ikan tersebut juga masih jarang dibudidayakan. "Padahal nilai ekonominya sebenarnya cukup tinggi," kata pembudidaya ikan gabus di Kelurahan Paduroso, Kecamatan Purworejo, Priyo Andi Santoso.

Ikan tersebut belum dibudidayakan karena permintaan pasar yang masih sebatas untuk kalangan tertentu. Ikan itu

jarang ditemukan diperjualbelikan di pasar-pasar tradisional Kabupaten Purworejo.

Masyarakat masih jarang mengonsumsi ikan gabus diduga karena termakan mitos yang menyebutkan, konsumsi ikan itu memperlambat penyembuhan luka. Selain itu, bentuk kepala ikan yang mirip kepala ular itu membuat sebagian orang merasa jijik dan takut sehingga malas mengonsumsinya.

Padahal ikan tersebut memiliki banyak kandungan albumin dan mampu mempercepat proses penyembuhan luka. "Sudah ada penelitiannya dan dokter biasanya menyarankan pasien yang baru operasi untuk banyak mengonsumsi

ikan gabus biar lukanya cepat sembuh," terangnya.

Priyo memutar otak memikirkan cara mengenalkan ikan gabus kepada masyarakat luas. "Saya bersama beberapa teman, dengan bendera CV Bumi Menoreh Kencana (BMK) Purworejo, mencoba membuat terobosan mengolah daging ikan gabus," tuturnya.

Daging ikan <I>snakehead</I> itu diolah menjadi bakso. "Kami membuat olahan bakso ikan gabus," ujarnya.

Ide bakso ikan gabus, katanya, juga pas untuk situasi pandemi seperti sekarang. Masyarakat membutuhkan asupan protein yang cukup untuk memperkuat imunitas tubuh sehingga tidak gampang



KR-Jarot Sarwosambodo

Produksi bakso ikan gabus.

sakit.

Olahan bakso mengubah total tampilan ikan gabus. "Tujuan kami simpel saja, yakni ingin menjadikan ikan gabus ramah konsumsi bagi siapa saja. Maka dijadikan bakso yang dikenal sebagai makanan sejuta umat," ungkapnya.

BMK mulai melakukan produksi tahap awal dengan kapasitas mencapai 25 kilogram bakso untuk sekali masak. Produksi dilakukan dengan standard kebersihan yang ketat. Setiap pekerja yang memproduksi bakso ikan gabus menerapkan protokol kesehatan. Produk itupun dibuat

tanpa menggunakan campuran MSG atau campalmin. Bumbunya hanya gula pasir dan berbagai rempah alami secukupnya. Setelah jadi, bakso dikemas dalam plastik kedap udara dan bisa disimpan di lemari pembeku. Bakso dikemas dalam kantong isi 16 butir yang dijual Rp 19 ribu, dan kantong isi 24 butir Rp 24 ribu. "Uji coba kami, bakso tanpa pengawet itu bisa tahan hingga sebulan," terangnya.

Produk itu kemudian dipes ke pasar dan mendapat respons positif dari masyarakat sehingga memotivasi Priyo dan rekan usahanya untuk

meningkatkan kapasitas produksi. "Target kami seminggu bisa memproduksi seratus kilogram bakso ikan gabus. Kami juga mulai menjajaki olahan lain, yakni dalam bentuk nugget," ujarnya.

Untuk mencukupi kebutuhan bahan baku, Priyo membangun kemitraan dengan masyarakat Kelurahan Paduroso dan sejumlah desa lain. "Warga bisa membuat kolam, lalu kami sediakan bibitnya. Kalau sudah besar dengan ukuran 3-4 ekor perkilogram bisa dijual kepada kami kembali," terangnya. **(Jas)**

Grafis: Ario



KR-Jarot Sarwosambodo

Membersihkan ikan gabus sebelum diolah jadi bakso.